



BAB I

PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja pemerintah daerah menunjukkan seberapa efisien pemerintah dalam meraih tujuan dan target organisasi yang telah ditentukan berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah. Hasil tersebut menunjukkan seberapa efektif dan efisien program, kegiatan, serta kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Akibatnya, kinerja pemerintah daerah menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dianggap berkinerja baik jika dapat mengelola sumber daya dan proses pemerintahan secara efisien, sehingga menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, kinerja yang baik juga tampak dari penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. (Epriliani, 2022).

Sebagai bagian dari masyarakat, pemerintah daerah diharapkan prioritaskan kebutuhan warga dan mampu merespons berbagai tuntutan yang selalu berubah dengan menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan



akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepadanya. Dalam konteks tersebut, kinerja instansi pemerintah daerah menjadi aspek yang sangat penting karena mencerminkan keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan program pemerintah dalam suatu periode. Kinerja yang optimal mencerminkan kapasitas lembaga dalam melaksanakan program dan aktivitas dengan efisien (Tadjudinsyah & Fitria, 2023).

Kinerja adalah tolok ukur yang mencerminkan sejauh mana sukses sebuah organisasi dalam mengorganisir dan menjalankan kegiatan-kegiatannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pemerintahan, penilaian kinerja memiliki peran penting sebagai sarana evaluasi terhadap capaian yang telah diperoleh serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan pada periode selanjutnya. Evaluasi kinerja sektor publik bertujuan untuk menilai hasil kerja pemimpin dan unit yang dipimpin, serta mengukur seberapa besar tanggung jawab organisasi dalam menyajikan layanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat (Epriliani, 2022).

Kinerja juga menunjukkan sejauh mana organisasi berhasil dalam melaksanakan berbagai aktivitas untuk mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi yang ditentukan dalam perencanaan strategis. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan tidak hanya diukur dari sisi finansial, karena fokusnya bukan pada pencapaian keuntungan. Oleh sebab itu, pencapaian organisasi juga harus diukur melalui kinerjanya dalam menjalankan fungsi dan memberikan pelayanan kepada



masyarakat. Evaluasi kinerja sangat penting untuk memahami seberapa jauh organisasi dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya secara efektif dan efisien (Sarmigi & Maryanto, 2020).

Saat ini, sektor publik di Indonesia mendapat perhatian yang besar dari masyarakat, terutama terkait kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan baik sesuai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk merealisasikan pengelolaan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Di samping itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan juga memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Tadjudinsyah & Fitria, 2023).

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan efektivitas pengawasan internal sebagai langkah memperkuat kinerja pemerintah. Berbagai program perbaikan telah dijalankan, seperti penyempurnaan mekanisme perencanaan anggaran, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, peningkatan kualitas laporan keuangan, hingga penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam memberikan assurance dan konsultasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun kenyataannya, berbagai data menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam realisasi anggaran dan optimalisasi pendapatan. Dalam lima tahun terakhir, realisasi pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perubahan akibat sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Keadaan ini terlihat dari pencapaian pendapatan yang tidak sesuai dengan sasaran anggaran yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar sasaran pendapatan bisa tercapai secara optimal. Perubahan kinerja pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun dapat terlihat melalui data realisasi anggaran pendapatan selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021-2025

2021			
Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	218.047.130.045,00	226.601.412.440,00	103,92
Pendapatan Transfer	1.685.605.471.954,00	1.659.989.777.970,00	98,48
Lain-lain yang sah	88.065.704.000,00	88.246.125.900,00	100,20
Jumlah Pendapatan	1.991.718.305.999,00	1.974.837.316.310,57	99,15
2022			
Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	206.789.108.026,00	168.201.255.788,49	81,34
Pendapatan Transfer	1.745.643.570.559,00	1.727.576.740.532,00	98,97
Lain-lain yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.952.432.678.585,00	1.895.777.996.320,49	97,10
2023			
Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	200.808.143.550,00	194.126.525.020,77	96,67
Pendapatan Transfer	1.842.295.586.290,00	1.902.954.889.472,00	103,29
Lain-lain yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	2.043.103.729.840,00	2.097.081.414.492,77	102,64
2024			
Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Universitas Islam Indragiri

Pendapatan Asli Daerah	233.222.088.268,00	200,687.606.954,61	86,05
Pendapatan Transfer	1.924.639.022.606,00	2.003.811.498.614,00	104,11
Lain-lain yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	2.157.861.110.874,00	2.204.499.105.568,06	102,16
2025			
Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	283.199.719.569,30	-	-
Pendapatan Transfer	1.766.156.502.986,00	-	-
Lain-lain yang sah	0,00	-	-
Jumlah Pendapatan	2.049.356.222.555,30	-	-

Sumber: (<https://bpkad.inhilkab.go.id>)

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa dinamika kinerja pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sangat baik dengan capaian di atas 100 persen. Namun, kondisi ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 dan 2024 menunjukkan penurunan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup menonjol, masing-masing hanya mencapai 81,34 persen dan 86,05 persen dari target. Rendahnya realisasi tersebut mencerminkan ketidaktepatan penetapan target, lemahnya optimalisasi sumber pendapatan, kurang maksimalnya penagihan pajak dan retribusi, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pendapatan transfer mendominasi struktur pendapatan daerah setiap tahunnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum kuat dan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan belum berjalan efektif.

Sejalan dengan kondisi tersebut, fenomena ini membuka kemungkinan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pengawasan internal. Fungsi pengawasan internal yang idealnya mampu mengidentifikasi hambatan pencapaian target,



mengevaluasi disiplin pelaksanaan pendapatan oleh OPD, serta mendeteksi dini potensi inefisiensi atau penyimpangan, tampaknya belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan data yang diakses dari (Redaksi, 2025), terungkap dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau yang mencatat tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari pihak ketiga mencapai lebih dari Rp 327 miliar pada periode 2022-2023. Situasi ini mendorong lembaga swadaya masyarakat seperti INPEST untuk meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan menyeluruh, mengingat besarnya piutang pajak yang tak tertagih tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan internal, tetapi juga dapat berisiko menyebabkan kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada terhentinya alokasi pembangunan daerah (<https://arrayyan.co>).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap signifikan antara potensi sumber daya daerah dengan efektifitas pengelolaan keuangan dan pengawasan internal pada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, yang tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen administrasi, tetapi dari kemampuan pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan, memberikan layanan publik yang berkualitas, dan memanfaatkan sumber daya fiskal secara efektif. Lemahnya pengawasan internal serta belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah, sehingga banyak program strategis yang seharusnya menjadi prioritas tidak dapat dijalankan secara maksimal. Keadaan tersebut



meminta pemerintah daerah agar lebih efisien dalam mengelola sumber daya yang ada dengan dukungan pengawasan internal yang baik.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tercermin dari tingkat kinerja yang diperoleh. Kinerja adalah gambaran dari keberhasilan dalam mengimplementasikan program, kegiatan, serta kebijakan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis organisasi. Kinerja optimal mencerminkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Selain itu, prestasi juga berfungsi sebagai dasar penilaian untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah serta sebagai pedoman dalam perbaikan kinerja di periode mendatang (Bong, 2021).

Kinerja pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh tahap pengelolaan sumber daya finansial yang dilakukan berdasar pada prinsip akuntabilitas, transparansi, integritas, pengawasan, serta efisiensi (value for money). Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif serta dapat diawasi oleh masyarakat guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Fathony et al., 2023). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap tersebut merupakan bagian



dari otoritas pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang teratur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran akuntansi sektor publik berfokus pada penyediaan informasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif serta akuntabel. Keberhasilan dalam pelayanan publik dapat diukur melalui aksesibilitasnya. Ketika suatu wilayah tidak mampu menyediakan layanan dasar yang seharusnya diterima oleh penduduk, maka hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan seluruh warga. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam penyelenggaraan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan internal yang efisien.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, pemerintah daerah diharuskan untuk mengawasi secara internal pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan internal adalah serangkaian kegiatan yang mencakup analisis, penilaian, pemantauan, serta metode pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa organisasi mampu memberikan jaminan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, Adrian (2023) menjelaskan bahwa pengawasan internal adalah proses terencana untuk menetapkan tolok ukur kinerja, merancang sistem umpan balik, membandingkan hasil implementasi dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. membuat sistem umpan balik, menganalisis hasil pelaksanaan terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan, mengenali penyimpangan, serta



melakukan langkah perbaikan yang diperlukan. Karena itu, pengawasan internal dapat dianggap baik jika dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan serta kepercayaan publik.

Sejumlah penelitian mengenai Dampak Manajemen Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamidah et al., (2024) yang berjudul “Dampak Pengelolaan Keuangan Daerah dan Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Studi yang dilakukan oleh Epriliani (2022) berjudul “Dampak Penerapan Good Governance, Pengawasan Internal, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh pada kinerja pemerintahan daerah Kota Pekanbaru.

Akan tetapi, hasil penyelidikan tersebut bertentangan dengan penemuan yang diperoleh oleh Karlina et al., (2023) yang berjudul “Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja institusi pemerintahan, karena pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan belum optimal dan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja lembaga pemerintah. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan



internal dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi pemerintah dengan lebih efisien.

Merujuk pada ketidaksesuaian hasil riset sebelumnya, peneliti berminat untuk mengkaji ulang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap performa pemerintahan. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari studi sebelumnya, yaitu penelitian (Hamidah et al., 2024) yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah serta Audit Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat).” Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen kedua (X2), subjek penelitian, serta tahun pelaksanaannya. Studi sebelumnya memakai audit internal sebagai variabel independen kedua (X2), dengan objek penelitian di Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian ini mengandalkan pengawasan internal sebagai variabel independen kedua (X2), dengan fokus penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir serta pelaksanaannya pada tahun 2026.

Penentuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai subjek penelitian ini berlandaskan pada sejumlah pertimbangan, yaitu OPD adalah pelaksana inti kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan manajemen keuangan, layanan publik, dan pembangunan daerah. Selain itu, kinerja OPD juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga penelitian pada OPD diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai



pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Dengan adanya paparan tersebut, banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Maka penelitian ini dituangkan ke dalam judul **“PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah di lingkungan OPD, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai peraturan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

b. Pengawasan Internal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian teoritis mengenai fungsi pengawasan internal dalam pemerintah daerah. Secara keilmuan, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman bahwa pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi yang mendorong perbaikan kinerja OPD.

c. Kinerja Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kinerja OPD di tingkat kabupaten. Hasil penelitian diharapkan mampu menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak hanya bergantung pada pencapaian program dan kegiatan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangan serta efektivitas pengawasan internal yang diterapkan.



1.3.2.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan penelitian selanjutnya serta menjadi sumber informasi dalam memahami pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya OPD Kabupaten Indragiri Hilir, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas pengawasan internal, serta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme kerja guna mendukung peningkatan kinerja pemerintah secara lebih optimal.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam memperluas pengetahuan dan memperkaya kajian terkait pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan internal, khususnya dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pemerintah.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.